

**ANALISIS YURIDIS DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
KAPAL YANG BERLAYAR TANPA SURAT PERSETUJUAN
BERLAYAR
(STUDI KASUS NOMOR 45/Pid.Sus/2019/PN Srp)**

HIKMAL AZHAR

203300516103

**Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum**



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL
TAHUN
2024**

**"JURIDICAL ANALYSIS IN ADDRESSING THE CRIMINAL ACT OF A
SHIP SAILING WITHOUT APPROVAL
(CASE STUDY NUMBER 45/Pid.Sus/2019/PN Srp)."**

HIKMAL AZHAR

203300516103

**This thesis was submitted as one of the requirements to obtain a Bachelor of
Laws degree**



DEGREE PROGRAM

LEGAL PROGRAM

FACULTY OF LAW

2024

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**“ANALISIS YURIDIS DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
KAPAL YANG BERLAYAR TANPA SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR
(STUDI KASUS NOMOR 45/Pid.Sus/2019/PN Srp)”**

Skripsi ini telah kami setujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji Program
Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional.


Jakarta, 06 Februari 2024

Mengetahui,

Dekan,

Pembimbing,


(Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.)


(Dr. Sulistyowati, S.H., M.H.)

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hikmal Azhar
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 19 April 2002
Nomor Pokok : 203300516103
Fakultas : Hukum
Alamat : Kav. Mandiri JL. Lokomotif RT. 007 RW. 021 Kel. Pejuang Kec. Medan Satria Kota Bekasi
HP/Telepon : 085217630454

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **ANALISIS YURIDIS DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KAPAL YANG BERLAYAR TANPA SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (STUDI KASUS NOMOR 45/Pid.Sus/2019/PN Srp)** adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasi semua data yang saya gunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan orisinil. Bila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiat maka saya bersedia mempertanggung jawabkan secara hukum sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Jakarta, 06 Februari 2024



Hikmal Azhar

TANDA TANGAN PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

Judul Skripsi:

**"ANALISIS YURIDIS DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
KAPAL YANG BERLAYAR TANPA SURAT PERSETUJUAN
BERLAYAR (STUDI KASUS NOMOR 45/Pid.Sus/2019/PN Srp)"**

Skripsi ini telah kami setuju untuk dipertahankan di hadapan Tim penguji pada tanggal 1 Maret 2024 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** dan predikat **Cumlaude**.

Jakarta, 1 Maret 2024

Mengetahui,

Dekan,

Pembimbing,

(Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H, M.Si)

(Dr. Sulistyowati, S.H., M.H.)

Tim Penguji,

Ketua,

Anggota,

Anggota,

(Dr. Diah Ratu Sari, S.H.,
M.H.)

(Dr. Hartrin, S.H., M.H.,
M.Si. (Han))

(Dr. Sulistyowati, S.H.,
M.H.)

ABSTRAK

PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS NASIONAL PROGRAM STUDI HUKUM SKRIPSI, JANUARI 2024

- A. Nama Penulis** : Hikmal Azhar
- B. Nomor Pokok Mahasiswa** : 203300516103
- C. Judul Skripsi** : ANALISIS YURIDIS DALAM PENAGGULANGAN TINDAK PIDANA KAPAL YANG BERLAYAR TANPA SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (STUDI KASUS NOMOR 45/Pid.Sus/2019/PN Srp)
- D. Jumlah Halaman** : Halaman Pengantar 11, Halaman Isi 74.
- E. Isi Abstrak** : Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen yang sangat penting dalam pengaturan pelayaran kapal perikanan di pelabuhan. Dokumen ini menunjukkan bahwa kapal telah memenuhi segala persyaratan yang diperlukan, termasuk kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya, sebelum diperbolehkan untuk berlayar meninggalkan pelabuhan. Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar oleh Syahbandar bertujuan untuk memastikan bahwa kapal perikanan dapat melakukan pelayaran dengan aman dan mematuhi aturan yang berlaku. Metode penelitian merupakan suatu proses yang sifatnya mutlak dan harus dilakukan dalam kegiatan penelitian, Penelitian hukum ini dilakukan dengan menerapkan metode penelitian hukum normative Yuridis. Dalam penelitian ini, digunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat Hukum normatif, Metode analisis hukum yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. memutuskan kepada terdakwa dengan pidana penjara dalam waktu 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan sesudah pengadilan menjatuhkan putusan pengadilan yang mana mendapatkan daya hukum tetap dan apabila tidak sanggup melunasi atau mencukupi diubah dengan hukuman penjara dalam kurung waktu 1 (satu) bulan. Hambatan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran aktivitas berlayar minimnya pemahaman masyarakat terhadap tindak pidana pelayaran Selain itu, rendahnya kesadaran masyarakat akan kompleksitas pembuatan SPB, di mana seringkali kebutuhan uang pelican menjadi faktor penentu kepatuhan. Kondisi ini menciptakan dorongan untuk mengabaikan persyaratan pembuatan surat persetujuan berlayar (SPB), seiring dengan persepsi bahwa melanggar aturan berlayar lebih mudah, cepat, dan ekonomis.
- Kata Kunci:** Pelayaran, Surat Persetujuan Berlayar (SPB), Syahandar
- F. Daftar Pustaka** : 16 buku, 12 peraturan perundang-undangan, 10 jurnal, 4 website.
- G. Dosen Pembimbing** : Dr. Sulistyowati, S.H., M.H.

ABSTRACT

NATIONAL UNIVERSITY UNDERGRADUATE PROGRAM
LEGAL STUDIES PROGRAM
THESIS, JANUARY 2024

- A. Writer's Name** : Hikmal Azhar
- B. NPM** : 203300516103
- C. Thesis Title** : JURIDICAL ANALYSIS IN ADDRESSING
THE CRIMINAL ACT OF A SHIP SAILING
WITHOUT APPROVAL (CASE STUDY
NUMBER 45/Pid.Sus/2019/PN Srp)
- D. Number of Pages** : Introduction Page 11, Contents Page 74.
- E. Contents of the Abstract** : The Sailing Approval Letter is a crucial document in regulating the sailing of fishing vessels in ports. This document indicates that the vessel has met all necessary requirements, including seaworthiness and other obligations, before being allowed to sail out of the port. The issuance of the Sailing Approval Letter by the Harbor Master aims to ensure that fishing vessels can sail safely and comply with applicable rules. Research methodology is an essential and indispensable process in research activities. This legal research is conducted by applying the normative legal research method. Two approaches are used in this research: the statutory approach and the case approach. This is a normative legal research, and the legal analysis method applied in this research is a qualitative approach. The decision rendered to the defendant is imprisonment for a period of 1 (one) year and a fine of Rp 10,000,000.00 (ten million Indonesian Rupiah). If the fine is not paid, it will be substituted with imprisonment for 1 (one) month after the court's decision becomes legally binding. If unable to pay or insufficient, it will be replaced with imprisonment for 1 (one) month. Challenges in law enforcement against sailing violations include the minimal understanding of the public regarding maritime crimes. Additionally, the low awareness of the complexity of obtaining the Sailing Approval Letter, where often the need for bribe money becomes a determining factor for compliance. This situation creates an incentive to disregard the requirements for obtaining the Sailing Approval Letter (SPB), alongside the perception that violating sailing regulations is easier, quicker, and more economical.
- Keywords:** Sailing, Sailing Approval Letter (SPB), Harbor Master.
- F. Bibliography** : 16 books, 12 laws and regulations, 10 journal, 4 websites.
- G. Supervisor** : Dr. Sulistyowati, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T., karena atas limpahan dan karunia-Nya, penulis senantiasa diberikan nikmat sehat dan iman serta kesempatan menikmati proses indah kehidupan kemahasiswaan di Perguruan Tinggi, rezeki yang tak ternilai sampai akhir proses skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KAPAL YANG BERLAYAR TANPA SURAT PERSETUJUAN BERLAYAR (STUDI KASUS NOMOR 45/Pid.Sus/2019/PN Srp)”** sebagai buah karya penulis dalam rangka melengkapi serta memenuhi syarat meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Nasional.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun bagi penyempurnaan skripsi ini. Bantuan dan dukungan baik berupa moril dan spiritual dari semua pihak sangat membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini. Pada kesempatan ini, penulis dengan penuh rasa hormat mengucapkan terima kasih dengan tulus ikhlas, terkhusus kepada:

1. Dr. Ramlan Siregar, M.Si., selaku ketua pengurus Yayasan Memajukan Ilmu dan Kebudayaan (YMIK);
2. Dr. Drs. El Amry Bermawi Putera, M.A., selaku Rektor Universitas Nasional;
3. Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional;

4. Dr. Mustakim, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional;
5. Bapak Masidin, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional;
6. Dr. Diah Ratu Sari, S.H., M.H., selaku Ketua Pilihan Konsentrasi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Nasional;
7. Dr. Sulistyowati, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang juga merupakan dosen PA saya, yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga dan pikirannya dengan penuh kesabaran dalam membimbing dan mengarahkan serta memberi saran dan nasihat yang sangat berharga kepada Penulis selama proses penulisan skripsi ini;
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga kepada penulis;
9. Staf-staf Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah membantu segala urusan Penulis selama perkuliahan;
10. Kepada kedua Orang Tua penulis Ayah Mursidi dan Ibu warnida dan juga adik saya Rizka Fauziah yang senantiasa selalu mendoakan, memberikan semangat, kasih sayang tiada henti penuh dengan kesabaran, motivasi, nasehat dan juga dukungan kepada penulis dalam bentuk moril ataupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan menyandang gelar Sarjana;
11. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan Penulis di masa kuliah sejak semester pertama, yaitu angkatan 2020 Fakultas Hukum yang telah mensupport dan terus berjuang bersama hingga mendapatkan gelar sarjana.

12. Seluruh Anggota Himpunan Mahasiswa Hukum Periode 2023/2024 yang terus mensupport penulis dari awal penulisan skripsi ini;
13. Rekan-Rekan Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Hukum Universitas Nasional, yang terus memberikan support kepada penulis;
14. Rekan-Rekan Magang MBKM Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Kelas 1A Khusus, Rizky Maeda, Atha Kurniadi, Dio Rizky, Nisrina, Ester Wermasaubun, Villania, Paula, Lidya yang telah berjuang bersama sejak awal mulai magang hingga selesai magang;
15. Dan Kepada Kelvin Onasis Selaku sahabat dan juga kaka Tingkat di Fakultas Hukum Universitas Nasional yang telah meluangkan waktu dan pikiran untuk mengarahkan dan memberi saran kepada Penulis selama proses penulisan skripsi ini:

Akhir kata, sekali lagi penulis mengucapkan terima kasih, semoga bantuan yang telah diberikan oleh para pihak mendapatkan balasan pahala dari Allah SWT. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan wawasan bagi kita semua.

Bekasi, 06 Februari 2024



Hikmal Azhar

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Lembar Pernyataan	iii
Tanda Tangan Pengesahan dan Penilaian Skripsi	iv
Abstrak	v
Kata Pengantar	vii
Daftar isi	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Kerangka Teori & Konseptual	6
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana	20
B. Tinjauan Umum Syahbandar	24
C. Tinjauan Umum Surat Persetujuan Berlayar (SPB)	32
D. Tinjauan Umum Nahkoda	36
E. Tinjauan Umum Kejahatan Laut	38
BAB III FAKTA DAN OBJEK PENELITIAN	44
A. Kasus Posisi	46
B. Pertimbangan Hakim	48
C. Amar Putusan Hakim	50
BAB IV ANALISA YURIDIS	52
A. Kualifikasi Syahbandar dalam Menerbitkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB)	52
B. Pelaksanaan Penegakan Hukum Pada Tindak Pidana Berlayar Tanpa Izin dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dalam Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2019/PN Srp	65

BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA	75
LAMPIRAN	79

